

Dampak Dana Desa terhadap Ketimpangan Desa-Kota di Indonesia

The Impact of Village Fund on Rural-Urban Inequality in Indonesia

Aditya Muhammad Mudzakir^{1*}

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia; *Penulis korespondensi.

e-mail: admudzakir@gmail.com

(Diterima: 13 Desember 2023; Disetujui: 5 Oktober 2024)

ABSTRACT

This study aims to analyze whether the Village Fund (VF), which has been implemented for almost a decade since first implemented in 2015, has been able to reduce rural-urban inequality in Indonesia. Apart from being one of the national development priority agendas, reducing inequality is also one of the Sustainable Development Goals (SDGs) agendas. The research employs secondary data and consists of two main stages of analysis. First, a paired sample t-test was used to test the level of rural-urban inequality in Indonesia before (Pre) and after (Post) Village Fund. Second, the author analyzed the impact of the Village Fund on rural-urban inequality through a linear regression test. The results show that there is a decrease in rural-urban inequality by 0.0335 - 0.0462 after testing the Pre-VF and Post-VF. Meanwhile, using provincial-level panel data from 2016 to 2023, it was found that the decline of rural-urban inequality in Indonesia was affected by the Village Fund policy. It means that the Village Fund as one of the financial incentive policies for village development has an impact on rural-urban inequality reduction in Indonesia, although the impact is still extremely limited.

Keywords: regional development, rural development, rural-urban inequality, SDGs, village fund.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah Dana Desa (DD) yang sudah berjalan hampir satu dekade sejak awal diberlakukannya pada tahun 2015 telah mampu menurunkan ketimpangan desa-kota di Indonesia. Mengingat, selain menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, penurunan ketimpangan juga menjadi salah satu agenda dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan terdiri dari dua tahap analisis utama. Pertama, dilakukan *paired sample t-test* untuk menguji bagaimana tingkat ketimpangan desa-kota di Indonesia sebelum (*Pre*) dan setelah (*Post*) Dana Desa. Kedua, penulis melakukan analisis dampak Dana Desa terhadap ketimpangan desa-kota melalui *linear regression test*. Hasil menunjukkan bahwa terdapat penurunan ketimpangan desa-kota sebesar 0.0335 sampai 0.0462 setelah dilakukan pengujian pada data *Pre-DD* dan *Post-DD*. Sementara melalui penggunaan data panel tingkat provinsi tahun 2016 sampai 2023 ditemukan bahwa terjadinya penurunan ketimpangan desa-kota di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan Dana Desa. Dalam kata lain, Dana Desa sebagai salah satu kebijakan insentif finansial untuk pembangunan desa memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan desa-kota di Indonesia, meskipun pengaruh yang diberikan masih sangat terbatas.

Kata kunci: Dana Desa, ketimpangan desa-kota, pembangunan desa, pembangunan wilayah, SDGs.

PENDAHULUAN

Ketimpangan adalah salah satu masalah penting yang dihadapi oleh berbagai negara karena dampak negatifnya terhadap kohesi sosial, pembangunan berkelanjutan, stabilitas keamanan negara dan kesatuan politik (Lichter & Ziliak, 2017; Wei *et al.*, 2020). Seriusnya masalah ini dalam pembangunan mendorong *United Nations* menjadikan isu ketimpangan sebagai salah satu agenda dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yaitu pada SDGs ke 10, *Reduced Inequalities*.

Diantara masalah ketimpangan yang terjadi adalah ketimpangan wilayah, spesifiknya ketimpangan desa-kota. Pan *et al* (2023) & Young (2013) mengemukakan bahwa di seluruh dunia kesenjangan desa-kota menyumbang 40% dari rata-rata ketimpangan negara dan sebagian besar kesenjangan antar-negara. Diperkirakan bahwa 79% penduduk miskin dunia tinggal di perdesaan (Wang *et al.*, 2022). Ketimpangan ini tentu tidak hanya terbatas pada ukuran ekonomi (Wang *et al.*, 2022), tetapi juga terkait dengan pendidikan (Paulus *et al.*, 2021), lokasi (Mutono *et al.*, 2022), mobilitas (Leite Rodrigues *et al.*, 2021), lingkungan (Wei, 2015), layanan dasar dan lainnya. Desa sebagai wilayah yang identik dengan keterbatasan, terisolasi, dan kemiskinan harus mendapatkan perhatian supaya *gap* pembangunan terhadap kota tidak semakin jauh.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami permasalahan ketimpangan ini. Data Badan Pusat Statistik per maret 2023 menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan sebesar 12.22% sementara di perkotaan adalah 7.29%. Apabila dilihat dari akses terhadap layanan dasar, akses keterjangkauan masyarakat perdesaan terhadap fasilitas dasar kesehatan hanya mencapai 75.37%, sementara masyarakat perkotaan sebesar 82.22%. Apabila tidak diatasi dengan baik, kondisi ini dikhawatirkan mendorong peningkatan laju urbanisasi. Meskipun di satu sisi urbanisasi membawa kemakmuran bagi banyak kota, namun seringkali mengakibatkan kemunduran bagi perdesaan, terutama di negara-

negara berkembang (Liu & Li, 2017; Sun *et al.*, 2023).

Sebagai negara yang memiliki basis perdesaan yang besar, Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi permasalahan ini. Salah satu kebijakannya adalah menstimulasi pembangunan perdesaan untuk mengejar ketertinggalan dari perkotaan melalui insentif finansial ke perdesaan. Kebijakan ini dikenal sebagai Dana Desa. Ketiadaan sumber daya finansial menghambat desa untuk melakukan pembangunan (Hilmawan *et al.*, 2023).

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyaluran Dana Desa ini merupakan salah satu komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya akselerasi pembangunan desa, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa diberikan kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengatur pembangunannya lokalnya sendiri. Hal ini didasari bahwa desa memiliki legitimasi untuk menjalankan peran dalam perencanaan pembangunan wilayah melalui pemanfaatan dana dari berbagai sumber yang tersedia (Antlöv *et al.*, 2016).

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diberikan kepada setiap desa setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2015. Besaran alokasi dananya dilakukan dengan prinsip berkeadilan yang dipengaruhi oleh alokasi dasar, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sementara pengaturan prioritas penggunaannya dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mempertimbangkan desa sebagai target pembangunan adalah cara efektif untuk menjamin penurunan ketimpangan pendapatan (Li *et al.*, 2016; Wang *et al.*, 2022)

Kebijakan Dana Desa sudah berjalan hampir satu dekade. Hingga tahun 2023, sekitar 536.6 triliun rupiah telah dialokasikan pemerintah untuk mendorong pembangunan

bagi 74,961 desa-desa di seluruh Indonesia. Banyaknya anggaran dan cukup lamanya program berjalan, sangat perlu untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Beberapa penelitian telah menguji dampak dari Dana Desa terhadap pembangunan desa. Dana Desa mampu mendorong peningkatan infrastruktur (Permatasari *et al.*, 2021), keterjangkauan akses pendidikan (Kadafi *et al.*, 2020), pembangunan manusia (Angin *et al.*, 2023), serta meningkatkan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Arifin *et al.*, 2020). Selain itu, ditemukan juga bahwa Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan (Dwitayanti *et al.*, 2020), menurunkan angka kemiskinan (Kadafi *et al.*, 2020), berhubungan dengan aktivitas pembangunan (Permatasari *et al.*, 2021), berdampak positif terhadap tingkat pembangunan desa (Hilmawan *et al.*, 2023; Kharisma *et al.*, 2021), menstimulasi aktivitas ekonomi lintas sektor (Tohari, 2022), mampu mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah (Gede & Iskandar, 2023) serta berperan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (Ronaldo & Suryanto, 2022).

Pada konteks dunia, konsep pembangunan desa melalui insentif finansial juga telah dilakukan [Tabel 1]. Sebagai contoh pada salah satu negara Asean seperti Thailand bahwa *Thai Village Fund* berpengaruh positif

terhadap peningkatan kesejahteraan (Boonperm *et al.*, 2009). Selain itu, kebijakan insentif finansial pembangunan perdesaan di negara lain, seperti China memberikan pengaruh terhadap penurunan ketimpangan *income* desa-kota (Tang & Sun, 2022).

Namun, pada beberapa penelitian belum banyak ditemukan yang membahas mengenai dampak insentif finansial pembangunan desa atau Dana Desa terhadap penurunan ketimpangan wilayah, khususnya ketimpangan desa-kota. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji untuk menguji apakah Dana Desa mampu mengejar keteringgalan pembangunan perdesaan terhadap perkotaan. Selain itu, masih jarang juga ditemukan pada beberapa penelitian yang menggunakan kondisi kontrafaktual atau melakukan perbandingan ketika sebelum dan setelah dilakukannya intervensi (*treatment*) kebijakan Dana Desa. Maka dari itu, dalam rangka mengisi *gap* tersebut, penelitian ini akan menguji seperti apa kondisi ketimpangan desa-kota di Indonesia, bagaimana perbandingan ketimpangan desa-kota di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan Dana Desa dan bagaimana dampak Dana Desa terhadap penurunan ketimpangan desa-kota di Indonesia. Penelitian ini menjadi sangat esensial karena pembangunan desa merupakan agenda prioritas pembangunan di Indonesia.

Tabel 1. Kebijakan insentif finansial pembangunan perdesaan di beberapa negara

Negara/ Program	Dampak
Thailand/ <i>Thai Village Fund</i>	Meningkatkan kesejahteraan
Philippines/ <i>KALAH-CIDS</i>	Meningkatkan konsumsi dan akses layanan dasar
Afghanistan/ <i>National Solidarity Programme (NSP)</i>	Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan kesejahteraan ekonomi
Egypt/ <i>Village Savings and Loans Association</i>	Meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat
European Union/ <i>European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)</i>	Meningkatkan perekonomian dan pembangunan sosial
China/ <i>Incremental Reward for Agricultural (IRAL)</i>	Menurunkan ketimpangan pendapatan desa kota

Sumber: Beath *et al.*, (2015); Boonperm *et al.*, (2009); Labonne, (2013); Monsalve *et al.*, (2016); Shaaban, (2019); Tang & Sun, (2022)

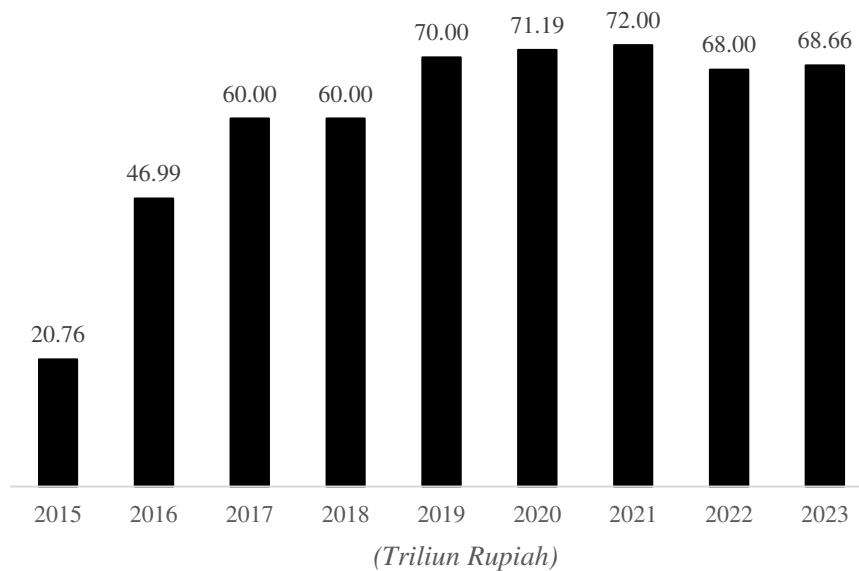
METODOLOGI

Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari beberapa sumber statistik instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) Republik Indonesia. Data yang disajikan adalah data Dana Desa dan ketimpangan desa-kota yang diperoleh dari koefisien gini (*gini coefficient*). Data yang digunakan pada masing-masing variabel merupakan data panel tingkat provinsi tahun 2016 sampai 2023. Khusus tahun terakhir (2023), data yang digunakan merupakan data

terakhir yang terpublikasi resmi per oktober 2023. Meskipun pada realitasnya pemberian Dana Desa sudah dimulai sejak tahun 2015, karena keterbatasan sandingan data pada level provinsi, maka tahun tersebut tidak dimasukkan sebagai bagian dari analisis.

Sementara itu, untuk melihat perbandingan ketimpangan desa kota sebelum dan setelah kebijakan Dana Desa (*Pre-DD* dan *Post-DD*), maka akan digunakan data ketimpangan desa-kota pada tiga tahun sebelum kebijakan Dana Desa direalisasikan, yaitu tahun 2012 sampai 2014 dan tiga tahun terakhir saat kebijakan Dana Desa diimplementasikan, yaitu tahun 2021 sampai 2023.



Gambar 1. Trend total Pagu Dana Desa per tahun

Sumber : simtrada.kemenkeu.go.id dan sid.kemendesa.go.id, 2023

Data penelitian yang akan dianalisis berupa data panel pada 33 Provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi tidak masuk dalam pengujian, seperti DKI Jakarta yang merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang bukan merupakan tujuan intervensi program Dana Desa. Selain itu, empat provinsi pemekaran baru di tahun 2023 (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya) juga tidak menjadi bagian dari analisis dikarenakan keterbatasan data pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun memiliki desa dan menjadi target intervensi Dana Desa per 2023.

Strategi Analisis

Secara garis besar, strategi analisis pada *paper* ini terbagi menjadi 2, yaitu analisis ketimpangan desa-kota dan analisis dampak Dana Desa terhadap ketimpangan desa-kota di Indonesia. Analisis ketimpangan desa-kota akan terbagi menjadi dua sub analisis, yaitu analisis perkembangannya dan analisis perbandingan ketimpangan desa-kota sebelum dan setelah kebijakan Dana Desa. Sementara itu, Analisis dampak Dana Desa terhadap ketimpangan desa-kota akan menjadi analisis utama pada *paper* ini.

Pada analisis tingkat perkembangan ketimpangan desa-kota di Indonesia akan menggunakan pemodelan grafik panel data koefisien gini. Koefisien gini (*gini coefficient*) merupakan salah satu pengukuran untuk menginvestigasi tingkat dan tren ketimpangan (Law *et al.*, 2020; Xu *et al.*, 2022). Koefisien gini menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan di Indonesia yang dilihat dari pengeluaran penduduk. Rentang nilai rasio tersebut adalah 0 sampai 1, dimana ketika mendekati 1 maka ketimpangan semakin tinggi sementara ketika mendekati 0 ketimpangan semakin rendah. Pada penelitian ini data ketimpangan didapatkan langsung dari Badan Pusat Statistik, sehingga peneliti tidak melakukan perhitungan ulang.

Sementara itu, untuk melihat sejauh mana perbedaan ketimpangan desa-kota sebelum perbedaan ketimpangan desa-kota sebelum (*Pre*) dan setelah (*Post*) kebijakan Dana Desa, akan dilakukan uji komparasi atau perbandingan. Analisis menggunakan *Paired Samples T-test* melalui dua model pengujian. Pertama, pengujian model 1 untuk membandingkan ketimpangan desa-kota di setiap level provinsi antara tahun terakhir sebelum kebijakan Dana Desa (2014) dan tahun terakhir saat implementasi Dana Desa berlangsung (2023). Kedua, pengujian model 2 melalui perbandingan ketimpangan desa-kota pada tiga tahun terakhir masing-masing periode sebelum kebijakan Dana Desa (2012 sampai 2014) dan setelah kebijakan Dana Desa (2021 sampai 2023). Penggunaan perbandingan pengujian data antar-waktu dinilai penting untuk menguji apakah hasil observasi data paralel atau tidak (Callaway & Sant'Anna, 2021). Wei (2015) mengungkapkan bahwa ketimpangan wilayah berubah seiring waktu, sehingga penggunaan dua model ini diharapkan menguji konsistensi hasil penelitian.

Terakhir, akan dilakukan analisis dampak Dana Desa terhadap ketimpangan desa-kota yang merupakan analisis utama pada *paper* ini. Analisis akan menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan Dana Desa digunakan sebagai *independent variable* (X), sementara ketimpangan desa-kota diuji sebagai *dependent*

variable (Y). Analisis ini menggunakan data panel level provinsi tahun 2016 sampai 2023. Maka, model yang diadopsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it}$$

dimana,

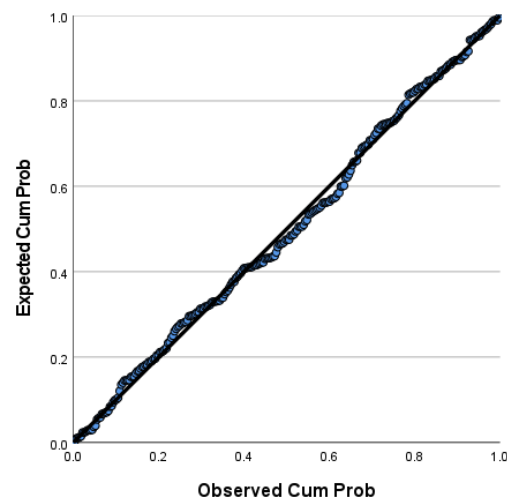
y_{it} : Ketimpangan desa-kota pada provinsi i tahun t

α : konstanta variable

β : koefisien

x_{it} : Dana Desa pada provinsi i tahun t

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, peneliti melakukan pengujian normalitas data terlebih dahulu. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal sebagai salah satu syarat pengujian statistik selanjutnya dalam penelitian ini.



Gambar 2. Hasil uji normalitas data
Sumber: Hasil pengujian, 2023

Setelah dilakukan pengujian melalui *Kolmogorov-Smirnov Test* pada aplikasi IBM SPSS Statistics 27, data dinyatakan terdistribusi normal (*Asymp. Sig. 2-tailed 0.200*) [Gambar. 2].

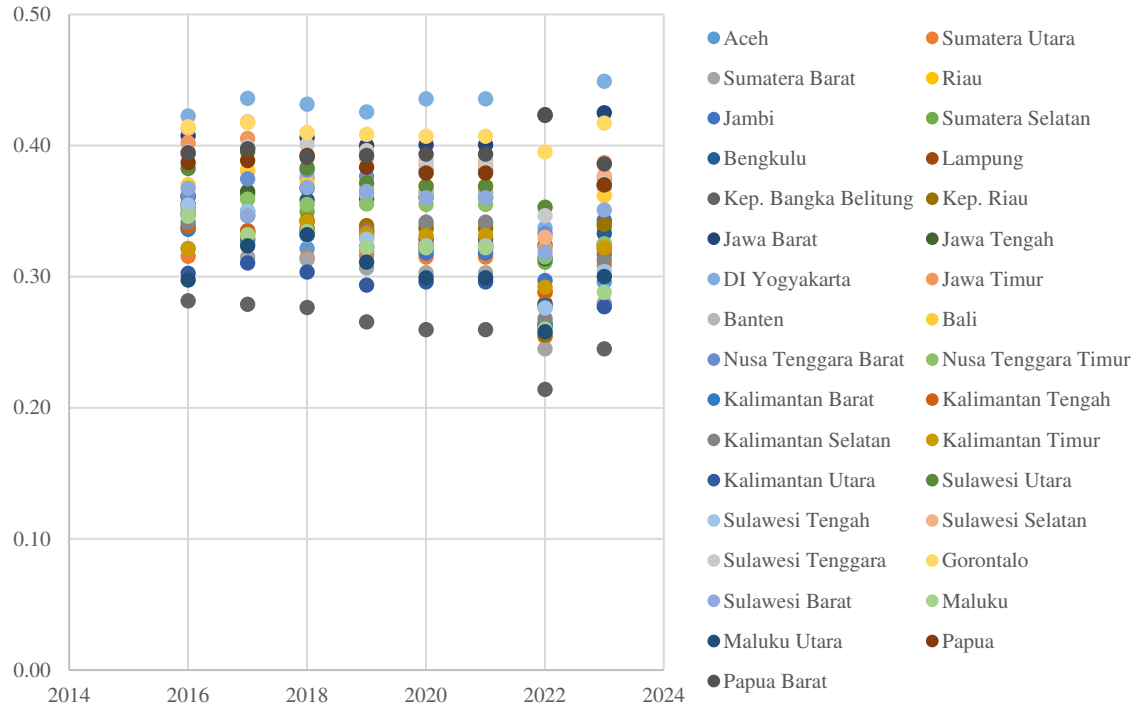
HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Desa-Kota di Indonesia

Berdasarkan data *gini coefficient* tahun 2016 sampai 2023 [Gambar 3], rentang gabungan ketimpangan desa-kota di Indonesia berkisar antara 0.210 sampai 0.450. Ketimpangan tertinggi berada di Provinsi D.I.

Yogyakarta pada tahun 2023 dengan koefisien gini sebesar 0.449 dan ketimpangan desa-kota terendah berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 sebesar 0.214. Kedua

provinsi tersebut sekaligus menjadi provinsi di Indonesia yang mengalami ketimpangan desa-kota tertinggi dan terendah yang cukup konsisten dari tahun 2016 sampai 2023.



Gambar 3. Perubahan ketimpangan desa-kota di Indonesia berdasarkan *coefficient gini*
Sumber : bps.go.id, diolah, 2023

Dilihat dari rata-rata koefisien gini nasional tahun 2016 sampai 2023 (0.345), terdapat 15 provinsi yang ketimpangan desa-kotanya di atas rata-rata tersebut. Jika diurutkan dari tertinggi hingga terendah, lima provinsi dengan ketimpangan desa-kota tertinggi pada periode tahun 2016 hingga 2023 adalah D.I. Yogyakarta (0.422), Gorontalo (0.410), Papua Barat (0.396), Jawa Barat (0.394), dan Papua (0.388). Sisanya tersebar di seluruh pulau kecuali di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang mengindikasikan ketimpangan pada provinsi-provinsi di kedua pulau tersebut rendah atau di bawah rata-rata nasional. D.I. Yogyakarta dan Jawa Barat yang berada di Pulau Jawa dan dikenal memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi justru mengalami tingkat ketimpangan desa-kota yang sama dengan dua provinsi-provinsi di Papua (Papua Barat dan Papua) yang pembangunan wilayahnya tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan model ketimpangan *inverted-U* berdasarkan teori

ketimpangan Kuznets dan teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Ketimpangan akan meningkat pada awal pembangunan dan menurun seiring perekonomian mulai maju (Jadhav, 2023; Wei *et al.*, 2020; Williamson, 1965). Zhou & Shi (2022) mengungkapkan lebih rinci bahwa ketimpangan di suatu negara diasumsikan bergeser dari yang relatif rendah ke tinggi dan kembali ke tingkat rendah seiring pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini seringkali terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia.

Jika dilihat secara lebih rinci pada data tersebut, lebih dari tiga perempat (78,79%) wilayah provinsi di Indonesia dominan mengalami perkembangan penurunan ketimpangan desa-kota. Lima provinsi yang mengalami penurunan ketimpangan tertinggi secara berurutan adalah Maluku, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Aceh dan Lampung. Sementara itu, provinsi lainnya justru mengalami peningkatan kesenjangan. Provinsi tersebut diantaranya D.I. Yogyakarta, Jawa

Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

Perbandingan Ketimpangan Desa-Kota *Pre* dan *Post* Kebijakan Dana Desa

Kebijakan insentif pembangunan desa yang diberikan pemerintah kepada desa-desa di seluruh Indonesia atau dikenal dengan Dana Desa mulai diberikan pada tahun 2015. Bantuan finansial ini berupaya mendorong pembangunan desa supaya desa-desa mengejar ketertinggalan pembangunannya, khususnya terhadap perkotaan. Desa-desa diharapkan mampu melakukan pembangunannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal desa, baik pendayagunaan sumber daya alamnya, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar, pelayanan sosial dasar maupun pemberdayaan masyarakat desa. Melalui kemajuan pembangunan desa yang terjadi diharapkan mampu menurunkan *gap* pembangunan antara perdesaan dan perkotaan. Dalam kata lain ketimpangan pembangunan desa-kota di setiap provinsi di Indonesia akan semakin sempit.

Tabel 2. Perbandingan ketimpangan desa-kota *Pre* and *Post* Dana Desa

	Variabel	Mean	Std. Error
Model 1 ^a	<i>Pre</i> -DD	.3772	.0071
	<i>Post</i> -DD	.3437	.0078
Model 2 ^b	<i>Pre</i> -DD	.3778	.0038
	<i>Post</i> -DD	.3316	.0049

Sumber: Hasil analisis, 2023

^a komparasi tahun 2014 dengan 2023

^b komparasi tahun 2012-2014 dengan tahun 2021-2023

Melalui *comparation test* menggunakan uji *paired sample T-test*, diketahui bahwa terdapat perbedaan ketimpangan desa-kota sebelum dan setelah kebijakan Dana Desa. Baik pada model 1 maupun model 2 terlihat perbedaan antara kedua periode perbandingan. Pada model 1 yang menggunakan perbandingan tahun terakhir sebelum kebijakan Dana Desa (2014) dan tahun terakhir pada berjalannya kebijakan Dana Desa (2023), terdapat selisih mean sebesar -0.0335. Kondisi ini menandakan adanya penurunan rata-rata ketimpangan desa-kota pada tahun 2014 ke 2023. Sementara pada

model ke-2 yang menggunakan data tiga tahun terakhir pada masing-masing periode, ditemukan juga adanya penurunan *mean* ketimpangan desa-kota sebesar -0.0462. Koefisien gini pada tiga tahun sebelum kebijakan Dana Desa (2012 s.d 2014) sebesar 0.3778 menurun menjadi 0.3316 pada tiga tahun terakhir ketika implementasi kebijakan Dana Desa berlangsung (2021 s.d 2023).

Tabel 3. Uji signifikansi

Variabel	Model 1 ^a	Model 2 ^b
Observations	32	96
Sig.	< .001	< .001
Sig. (2-tailed)	< .001	< .001
Std. Error	.0046	.0037

Sumber: Hasil analisis, 2023

^a komparasi tahun 2014 dan 2023

^b komparasi tahun 2012-2014 dan tahun 2021-2023

Sementara itu, apabila dilihat taraf signifikansi korelasi perbedaan ketimpangan desa-kota *Pre* Dana Desa dan *Post* Dana Desa, nilai signifikansi kedua model <0.05. Nilai Sig. dan Sig. (2-tailed) pada kedua model bernilai <0.001. Dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata ketimpangan desa-kota yang dilihat melalui koefisien gini antara sebelum kebijakan Dana Desa dan setelah implementasi kebijakan Dana Desa (*Pre*-DD dan *Post*-DD). Adanya kebijakan fiskal mampu menurunkan ketimpangan desa-kota secara signifikan, terutama ketimpangan pendapatan (Tang & Sun, 2022). Insentif finansial kepada desa mendorong desa untuk melakukan pembangunan dan mengejar ketertinggalan terhadap perkotaan.

Dampak Dana Desa terhadap Ketimpangan Desa-Kota

Selama rentang waktu 2016 sampai 2023 (N = 264), pemerintah Indonesia telah memberikan insentif finansial pembangunan desa melalui kebijakan transfer Dana Desa hampir sebesar Rp 536.6 triliun rupiah. Rata-rata alokasi per provinsi adalah sebesar Rp 1,942 miliar atau sekitar Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar lebih per desa. Selama kebijakan tersebut, ketimpangan desa-kota yang ditunjukkan oleh

koefisien gini berada pada nilai rata-rata ketimpangan 0.345, dengan koefisien tertinggi sebesar 0.45 dan terendah sebesar 0.21 [Tabel 4].

Tabel 4. *Variables summary* 2016–2023

Summary	Variable	
	X	Y
	Dana Desa (Milyar)	Ketimpangan Desa-Kota (gini coefficient)
N	264	264
Mean	1,942.756	.345
Std. Dev.	1,883.220	.043
Minimum	177.77	.21
Maximum	8,157.17	.45

Sumber: Hasil analisis, 2023

Hasil pengujian dampak Dana Desa terhadap penurunan ketimpangan desa-kota melalui penggunaan *linear regression method* menghasilkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0.022 [Tabel 5]. Nilai ini termasuk dalam kriteria signifikan, karena nilai sig. <0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Desa memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan desa-kota di Indonesia. Hasil ini searah dengan uji sebelumnya bahwa setelah implementasi kebijakan Dana Desa, ketimpangan desa-kota menurun. Hasil penelitian ini juga linier dengan temuan Hao & Wei (2010) dan Tang & Sun (2022) bahwa kebijakan fiskal mampu memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan desa-kota.

Dana desa mampu mengakselerasi secara positif capaian pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah (A.A. Ngurah Gede & Iskandar, 2023). Bahkan Wang *et al.* (2022) secara spesifik mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah, terutama perdesaan. Secara langsung Dana Desa mampu meningkatkan status desa yang diasosiasikan dengan tingkat kemandirian desa dan mendorong peningkatan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) (Arifin *et al.*, 2020; Yulitasari & Tyas, 2020). Dorongan-dorongan ini menjadi kekuatan desa untuk terus berkembang, mencapai kemandirian, dan meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunannya sehingga gap

ketimpangan perdesaan terhadap perkotaan dapat dipersempit.

Tabel 5. Dampak Dana Desa terhadap penurunan ketimpangan desa-kota

Variable	Ketimpangan desa-kota
Dana Desa	
Sig.	0.022 (0.000)*
Observations	264
Cons.	0.000 (0.004)*
R	0.142
R-Squared	0.020

* standar error

Sumber: Hasil analisis, 2023

Akan tetapi, besarnya dampak atau pengaruh dari Dana Desa terhadap penurunan ketimpangan desa-kota tidak besar, yakni hanya 2% sebagaimana ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi atau *R-squared* yang bernilai 0.020 [Tabel 4]. Ghazali (2016) menyatakan koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Dalam kata lain bahwa dampak yang diberikan oleh Dana Desa terhadap penurunan ketimpangan desa-kota masih sangat terbatas. Terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi penurunan ketimpangan desa-kota di Indonesia selain insentif finansial Dana Desa.

Meskipun begitu, hasil penelitian telah menunjukkan secara ilmiah bahwa dana desa sebagai salah satu kebijakan fiskal mampu memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan desa-kota. Dana Desa yang diberikan kepada desa-desa di Indonesia mampu menjawab tujuan dibuatnya kebijakan, yaitu dalam rangka mendorong pembangunan desa, melakukan pemberdayaan masyarakat desa, mengejar ketertinggalan pembangunan dan pengentasan kesenjangan. Hal ini selaras dengan pendapat Li *et al.* (2016) bahwa mempertimbangkan desa sebagai target pembangunan efektif untuk menjamin penurunan ketimpangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan melakukan studi untuk menguji dampak Dana Desa terhadap upaya penurunan ketimpangan desa-kota. Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan desa-kota menurun sebesar 0.0335 sampai 0.0462 setelah dilakukannya implementasi kebijakan insentif finansial untuk pembangunan desa melalui Dana Desa. Adapun melalui uji dampak, diketahui bahwa Dana Desa memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan-desa kota di Indonesia. Tentunya program yang berjalan selama sembilan tahun atau hampir satu dekade ini, setidaknya selain mampu menjawab salah satu agenda pembangunan nasional untuk menurunkan kesenjangan pembangunan juga turut serta dalam pencapaian salah satu dari 17 pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), yaitu *Reduced Inequalities*.

Akan tetapi, dampak yang diberikan masih sangat rendah dan terbatas. Terdapat faktor-faktor lain yang turut berpengaruh dalam mendorong penurunan ketimpangan desa-kota di Indonesia selain Dana Desa. Maka dari itu, penulis merekomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menguji faktor lain diluar Dana Desa yang turut mempengaruhi penurunan ketimpangan desa-kota, khususnya di Indonesia. Masih jarangya penelitian terkait ketimpangan pembangunan desa-kota di Indonesia menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas diskusi akademik mengenai hal ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan terima kasih kepada Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI yang mendukung penulis selama melaksanakan studi jenjang magister di Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, dihaturkan juga terima kasih kepada instansi terkait yang telah menyediakan dan memberikan data-data sebagaimana digunakan penulis pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ngurah Gede, W., & Iskandar, D. A. (2023). Dampak Dana Desa terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Regional di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 138–150. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.138-150>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Arcand, J.-L. (2008). Does Community Driven Development Work? Evidence from Senegal. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1265231>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., ... Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Beath, A., Christia, F., & Enikolopov, R. (2015). The National Solidarity Programme: Assessing the Effects of Community-Driven Development in Afghanistan. *International Peacekeeping*, 22(4), 302–320. <https://doi.org/10.1080/13533312.2015.1059287>
- Boonperm Jirawan, Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Does the village fund matter in Thailand?* Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/46443976>
- [BPS] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah Tahun 2012-2023. Retrieved October 27, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio>
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>

- Dwitayanti, Y., & Armaini, R. (2020). *The Impact of Village Fund Program Implementation Toward Society Welfare in Indonesia*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23*.
- Hao, R., & Wei, Z. (2010). Fundamental causes of inland–coastal income inequality in post-reform China. *The Annals of Regional Science*, 45(1), 181–206. <https://doi.org/10.1007/s00168-008-0281-4>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Jadhav, V. (2023). Dynamics of national development and regional disparity: evidence from 184 countries. *Journal of Economic Studies*, 50(5), 1048–1062. <https://doi.org/10.1108/JES-02-2022-0080>
- Kadafi, M., & Sudrahman, H. (2020). The Implications Of Village Funds Received By Underdeveloped Village Per District/City Against Poverty In Indonesia And Literacy Rate: Emperical Evidence In Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 9, 1. Retrieved from www.ijstr.org
- [Kemendesa] Kementerian Desa, P. D. T. dan T. R. I. (2023). Alokasi Dana Desa. Retrieved October 20, 2023, from <https://sid.kemendesa.go.id/village-fund/>
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Retrieved October 31, 2023, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>
- Kharisma, B., Taifur, W. D., & Muharja, F. (2021). The Impact of Budget, Geographic Difficulty, and Village Households on Village Status in Riau Province. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(3), 187–202. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.3.187-202>
- Labonne, J. (2013). *Philippines: The KALAHI-CIDSS Impact Evaluation A Revised Synthesis Report Sustainable Development-East Asia and Pacific Region*. Retrieved from http://kalahi.dswd.gov.ph/index.php?option=com_phocagal-
- Law, S. H., Naseem, N. A. M., Lau, W. T., & Trinugroho, I. (2020). Can innovation improve income inequality? Evidence from panel data. *Economic Systems*, 44(4), 100815. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100815>
- Leite Rodrigues, A., Giannotti, M., Cunha Barboza, M. H. C., & Alves, B. B. (2021). Measuring mobility inequalities of favela residents based on mobile phone data. *Habitat International*, 110, 102346. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102346>
- Li, Y., Westlund, H., Zheng, X., & Liu, Y. (2016). Bottom-up initiatives and revival in the face of rural decline: Case studies from China and Sweden. *Journal of Rural Studies*, 47, 506–513. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.07.004>
- Lichter, D. T., & Ziliak, J. P. (2017). The Rural-Urban Interface: New Patterns of Spatial Interdependence and Inequality in America. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 672(1), 6–25. <https://doi.org/10.1177/0002716217714180>
- Liu, Y., & Li, Y. (2017, August 16). Revitalize the world's countryside. *Nature*, Vol. 548, pp. 275–277. Nature Publishing Group. <https://doi.org/10.1038/548275a>
- Monsalve, F., Zafrilla, J. E., & Cadarso, M.-Á. (2016). Where have all the funds gone? Multiregional input-output analysis of the European Agricultural Fund for Rural Development. *Ecological Economics*, 129, 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.06.006>
- Mutono, N., Wright, J., Mutembei, H., & Thumbi, S. M. (2022). Spatio-temporal patterns of domestic water distribution, consumption and sufficiency: Neighbourhood inequalities in Nairobi, Kenya. *Habitat International*, 119, 102476. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102476>
- Pan, W., Wang, J., Li, Y., Chen, S., & Lu, Z. (2023). Spatial pattern of urban-rural integration in China and the impact of geography. *Geography and Sustainability*, 4(4), 404–413. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2023.08.001>

- Parajuli, D., Acharya, G., Chaudhury, N., & Thapa, B. B. (2012). *Impact of Social Fund on the Welfare of Rural Households Evidence from the Nepal Poverty Alleviation Fund The World Bank South Asia Region Sustainable Development Unit and Human Development Unit*. Retrieved from <http://econ.worldbank>.
- Paulus, L., Spinath, F. M., & Hahn, E. (2021). How do educational inequalities develop? The role of socioeconomic status, cognitive ability, home environment, and self-efficacy along the educational path. *Intelligence*, 86, 101528. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2021.101528>
- Perangin Angin*, S., Lubis, I., Tanjung, A. A., & Yahya, A. (2023). Analysis of Village Funds and Gross Regional Domestic Product Impacts Human Development Index in Nanggroe Aceh Darussalam Province. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 291–295. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.29581>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., ... Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. , Pub. L. No. 6, 1 (2014). Indonesia.
- Ronaldo, R., & Suryanto, T. (2022). Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village. *Resources Policy*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102839>
- Shaaban, S. (2019). Reviewing Egyptian community social fund (village savings and loans association, VSLA) as an approach for community social fund. *Horticulture International Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.15406/hij.2019.03.00105>
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality*. New York.
- Sun, B., Fang, C., Liao, X., Liu, M., Liu, Z., & Guo, X. (2023). Revealing the heterogeneous effects of new urbanization on urban-rural inequality using geographically weighted quantile regression. *Applied Geography*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2023.103082>
- Tang, L., & Sun, S. (2022). Fiscal incentives, financial support for agriculture, and urban-rural inequality. *International Review of Financial Analysis*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102057>
- Tohari, I. (2022). Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Economic Impact Assessment of Village Fund in Indonesia using Inter-Regional Input Output Analysis. In *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* (Vol. 4). Retrieved from <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Wang, J., Chang, H., & Long, J. (2022). Reducing rural income inequality and its spatial convergence in China during the past two decades. *Habitat International*, 130. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102694>
- Wei, Y. D. (2015). Spatiality of regional inequality. *Applied Geography*, 61, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.03.013>
- Wei, Y. D., Wu, Y., Liao, F. H., & Zhang, L. (2020). Regional inequality, spatial polarization and place mobility in provincial China: A case study of Jiangsu province. *Applied Geography*, 124. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102296>
- Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4, Part 2), 1–84. <https://doi.org/10.1086/450136>
- Xu, A., Qiu, K., Jin, C., Cheng, C., & Zhu, Y. (2022). Regional innovation ability and its inequality: Measurements and dynamic decomposition. *Technological Forecasting and Social Change*, 180, 121713. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121713>
- Young, A. (2013). Inequality, the Urban-Rural Gap, and Migration*. *The Quarterly Journal of Economics*, 128(4), 1727–1785. <https://doi.org/10.1093/qje/qjt025>
- Zhou, Q., & Shi, W. (2022). How does town planning affect urban-rural income inequality: Evidence from China with simultaneous equation analysis. *Landscape and Urban Planning*, 221. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104380>